

**STRATEGI PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH MELALUI PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI
KABUPATEN SOLOK SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Muhammad Farid Fadli

NPP. 29.0224

Asdaf Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat

Program Studi Keuangan Publik

Email: mfaridfadli@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The author focuses on the problem of low realization of Local Indigenous Income, especially Land Tax and Rural and Urban Buildings (PBB-P2) in South Solok Regency. **Purpose:** This research aims to analyze strategy, factors, and means that can be done by Local Government Finance Office to increase local own-source through rural and urban land and building tax. **Method:** This research uses descriptive qualitative method with inductive approach. The data source used in this research is primary and secondary data. Data collecting methods used in this research are observation, interview, and documentation. **Result:** Based on the research result, it can be concluded that the strategy, factors affecting local own-source escalation, and the means that can be done by Local Government Finance are internal factors of South Solok's Local Government Finance Office such as strength and weaknesses. On the other hand, the external factors are opportunities and threat. **Conclusion :** From the result of the SWOT matrix analysis, researcher would suggest some strategies that could be done through internal and external factors comparison that can be seen from S-O strategy, S-T strategy, W-O strategy, and W-T strategy, which are expected to be impactful in resolving the obstacles and also increasing local own-source through rural and urban land and building tax.*

Keywords: *SWOT, Local own-source, rural and urban land and building tax*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Peneliti berfokus pada permasalahan rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Solok Selatan . **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk menganalisis strategi yang dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini melalui data primer dan sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil/Temuan : Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa strategi, faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dan upaya yang dapat dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas faktor internal Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan yang terdiri atas kekuatan (strength) dan kelemahan (weaknesses), sedangkan faktor eksternal meliputi peluang (opportunities) dan ancaman (threat).

Dari hasil analisis melalui matriks SWOT peneliti kemudian dapat memberikan saran beberapa strategi yang dapat digunakan melalui komparasi faktor internal dan faktor eksternal yang dapat dilihat dari Strategi S-O, Strategi S-T, Strategi W-O dan Strategi W-T yang diharapkan dapat berpengaruh dalam mengatasi seluruh hambatan serta dapat berpengaruh dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Kata kunci: SWOT, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sebagai bagian integral dari Pembangunan Nasional. Semenjak adanya otonomi daerah, campur-tangan Pemerintah Pusat semakin berkurang dan Daerah diberi kewenangan yang lebih besar untuk mengelola pembangunan di daerahnya masing-masing dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan Otonomi Daerah yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Dengan Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan Pemerintah Daerah yang utama dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2002:132) "Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah". Pada umumnya sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah merupakan komponen yang memiliki potensi yang terus dapat digali dan dikembangkan pengelolaannya. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah adalah pengutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan. Pada saat sekarang banyak peralihan yang dilakukan terhadap jenis pajak yang mana pajak pusat berubah menjadi pajak daerah, hal ini diharapkan pelaksanaan pengelolaannya dapat lebih optimal dikarenakan pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat yang jelas lebih memahami keadaan wilayah daerah tersebut. Salah satu pajak yang dialihkan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang tertera pada Undang – undang nomor 28 tahun 2009. Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pengelolaannya di lakukan oleh pemerintah daerah merupakan wujud dari desentralisasi fiskal dan otonomi daerah. Berawal dari perubahan ini, PBB-P2 diharapkan menjadi sumber yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah, oleh karena itu dalam pengelolaan pendapatan dari PBB-P2 perlu dilakukan secara efektif sehingga berkontribusi besar terhadap penerimaan daerah.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pendapatan pada PBB-P2 di Kabupaten Solok Selatan cukup besar berperan terhadap Pendapatan Asli Daerah, namun jika kita lihat Realisasi dari PBB-P2 terhadap target yang ditetapkan cukup jauh dan pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup jauh yang dapat berpengaruh terhadap PAD di Solok Selatan.

Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Solok Selatan

Tahun	Target Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2016	884.296.041,00	422.128.411,00	47,73%
2017	2.500.000.000,00	723.019.561,00	28,92%
2018	2.000.000.000,00	682.106.680,00	34,1%
2019	2.500.000.000,00	527.842.143,00	21,08%
2020	150.000.000,00	116.533.127,00	77,33%

Pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan perlu melakukan pengoptimalan pada PAD terkhususnya dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ini karna merupakan sumber yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun realisasi dari penerimaan dari PBB ini masih kurang dikarenakan beberapa hal permasalahan yang terjadi dilapangan. Untuk mengatasi permasalahan pada penerimaan pajak terkhususnya pada PBB-P2, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Solok selatan terus melakukan perbaikan dan membuat inovasi berupa strategi-strategi agar realisasi penerimaan PBB-P2 dapat meningkat sehingga berperan besar pada penerimaan PAD di Kabupaten Solok Selatan. Pada saat ini pengelolaan pada penerimaan PBB-P2 terus dilakukan yang mana pada pemungutannya masih banyak kendala sehingga mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di kabupaten Solok selatan. Seperti yang di sebutkan oleh kepala bidang pendapatan BPKD Solok selatan, harus dilakukan strategi pada peningkatan PAD terkhususnya pada PBB-P2.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Penelitian oleh Deny dan Lailatul yang berjudul Strategi pemungutan PBB sebagai upaya meingkatkan Pendapatan Asli Daerah di kota Mojokerto. Dalam penelitian ini menjelaskan dimana diketahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota Mojokerto yaitu kurangnya kesadaran wajib pajak, keterbatasan Sumber Daya, adanya penilaian negatif terhadap aparatur pemungut pajak, dan adanya objek pajak yang kosong. Penelitian Maiza Fikri yang berjudul Analisis manajemen strategi peningkatan pelayanan pengelolaan PBB dan BPHTB pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang. Dalam penelitian ini menghasilkan strategi yang dilakukan dalam peningkatan kualitas pelayanan yaitu 1. melakukan sosialisasi kepada masyarakat, 2. meningkatkan jumlah sarana dan prasarana untuk pembayaran pajak. Penelitian Rambu Trio yang berjudul Strategi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Batu. Dalam penelitian ini

menjelaskan bahwa melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta pengalihan potensi daerah mampu mengoptimalkan pendapatan daerah untuk meningkatkan rasio kemandirian daerah. Penelitian Harjanto Hery yang berjudul Strategi peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Klaten. Dalam penelitian ini terdapat strategii yang dijalankan yaitu 1. Penyelesaian Tunggakan PBB, 2. Peningkatan NJOP sesuai harga Pasar, 3. Penggunaan upah-pungut dan insentif PBB yang lebih transparan dan tepat sasaran untuk menunjang kinerja pemungutan Pajak bumi dan Bangunan dan 4. peningkatan pelayanan. Selanjutnya penelitian Dhian Rahayu yang berjudul Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian ini strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan PBB meliputi 1) kenaikan NJOP, 2) komputerisasi PBB, 3) peremajaan data PBB dan 4) peningkatan kesadaran wajib pajak. Pelaksanaan strategi tersebut membutuhkan adanya dukungan dan komitmen dari semua pihak yang terkait dengan PBB ini.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana perbedaan terletak pada fokus dan lokus penelitian yang dilakukan. Penulis mengambil judul Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat yang kemudian dibahas dan diukur menggunakan teori rangkuti mengenai analisis SWOT untuk mendapatkan dan menentukan strategi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dilapangan pada saat penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Solok Selatan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menentukan strategi yang dilakukan dan yang dapat dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Solok Selatan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui PBB-P2 agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Metode ini digunakan penulis agar mempermudah penelitian tentang memahami Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Solok Selatan. Dalam penelitian kualitatif teori dikembangkan selama proses pengumpulan data. Serta melibatkan interpretasi dan pendekatan naturalistik untuk materi pokoknya. Sehingga dapat digambarkan bahwa peneliti kualitatif mempelajari hal-hal dalam latar alamiah mereka, mencoba untuk memahami atau menafsirkan fenomena atau kejadian dalam konteks makna mereka. Selanjutnya, pendekatan induktif adalah proses penalaran yang menggambarkan atau melukiskan fenomena serta mendapat data dari responden di lapangan, yang kemudian dilakukan penelitian agar dapat memecahkan permasalahan. Dalam penentuan informan didasarkan dengan menggunakan teknik *non-probability sampling* yakni *purposive sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang digunakan peneliti berdasarkan pada pengetahuan serta keahlian khusus yang dimiliki oleh individu maupun kelompok atau penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang dapat dijadikan sebagai sampel yang mewakili populasi dalam penelitian. *Purposive sampling* dipilih sebagai teknik pengambilan sampel guna memberikan informasi secara tepat dan akurat sesuai dengan topik permasalahan yang diteliti. Sehingga akan memudahkan peneliti memperoleh data serta keterangan mengenai Pendapatan Asli Daerah dan PBB-P2 di Kabupaten Solok Selatan agar meningkat. Untuk sumber data, penulis menggunakan data primer maupun sekunder yang dibutuhkan guna memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian mengenai Strategi peningkatan PAD melalui PBB-P2 di Kabupaten Solok Selatan. Adapun data primer yang dibutuhkan, meliputi hasil wawancara dari informan yang dianggap ahli atau mengerti di bidang pendapatan dan akuntansi, hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ketika terjun ke lapangan mengenai Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Solok Selatan. Data sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti guna melaksanakan penelitian yakni meliputi: Dokumen-dokumen mengenai laporan pendapatan pajak yang ada di kabupaten Solok Selatan, Dokumen seperti

LRA dari 5 tahun sebelumnya, Dokumen jumlah wajib pajak dan sumber pajak yang ada di Kabupaten Solok Selatan. Untuk memperoleh suatu data yang kompleks, mendalam serta empiris, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengamatan mengenai perilaku serta berbagai aktivitas dari individu-individu yang berada di lokasi penelitian. Wawancara dimana pewawancara (peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam pengumpulan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang diwawancarai. Peneliti merekam/mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semi struktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti), dan juga menggunakan metode wawancara berstruktur yang mana dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara lebih terstruktur, dengan menggunakan pedoman wawancara dan berbagai pertanyaan yang telah tersusun secara sistematis.

Wawancara berstruktur yang bersifat terstruktur dan menggunakan pedoman sistematis dalam proses wawancara kepada para informan serta telah menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan kepada yang dianggap ahli atau yang berkompeten dibidangnya seputar dengan pajak daerah, faktor penghambat dalam penerimaan Pajak daerah, serta upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan mengatasi hambatan yang ada. Penulis juga akan melakukan observasi partisipatif yang mana penulis ikut aktif dalam segala aktivitas yang dilakukan oleh BPKD Kabupaten Solok Selatan dalam hal penerimaan dan pengelolaan PAD. Dan dokumentasi dimana peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif. Dokumen ini bisa berupa dokumen publik (makalah, laporan kantor, dan website) ataupun dokumen privat (buku catatan, surat, dan email.) penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk memperoleh data dari sumber yang sama atau yang dikenal dengan Triangulasi Teknik. Dengan kata lain, penulis menggunakan Teknik pengumpulan data observasi partisipatif, wawancara terstruktur, serta dokumentasi untuk memperoleh data dari sumber yang sama hal ini dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat diuji kredibilitas datanya, serta dapat meningkatkan pemahaman penulis terhadap apa yang telah ditemukan. Dalam melakukan teknik analisis data, peneliti akan memilih data

dan informasi mana yang akan digunakan dan sesuai dengan objek studi. Lalu peneliti akan meringkas data dan informasi yang telah dipilih dalam bentuk yang lebih ringkas baik itu table, grafik, hubungan antara kategori, diagram alur, dan sejenisnya. Lalu peneliti akan menarik kesimpulan yang mendukung untuk pengumpulan data ke tahap berikutnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis hasil dari observasi dilapangan mengenai Penerimaan dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah di BPKD Solok Selatan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Solok Selatan

Kabupaten Solok Selatan mempunyai banyak sumber Pendapatan Asli Daerah seperti pajak dan retribusi hingga pajak hasil daerah lainnya. Pada hal kali ini penulis mengkhususkan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan.

Pada pada tahun 2021 Pendapatan Daerah yang lebih diutamakan yaitu Pendapatan Asli daerah yang meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dipungut terdiri dari 9 (sembilan) jenis Pajak Daerah dan 3 (tiga) jenis Retribusi Daerah.

Target dan realisasi Pendapatan Daerah adalah sebesar **Rp.850.560.190.190,00** dengan realisasi **Rp.866.235.598.985,00** atau **101,84%**. Adapun diskripsi pendapatan daerah tersebut sebagaimana terlampir pada tabel berikut :

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Solok Selatan

Tahun 2021

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	(%)
1	PENDAPATAN DAERAH	850.560.190.190,00	866.235.598.985,00	101,84
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	85.332.160.294,00	80.459.853.847,00	94,29
1.1.1	Pajak Daerah	18.526.000.000,00	16.500.169.327,00	89,06
1.1.2	Retribusi Daerah	1.458.750.000,00	1.235.018.343,00	84,66
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.700.551.019,00	1.700.551.019,00	100,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	63.646.859.275,00	61.024.115.158,00	95,88
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	719.028.134.291,00	741.085.202.403,00	103,07
1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	664.615.572.319,00	689.048.371.983,00	103,68
1.2.1.1	Dana Perimbangan	608.359.266.319,00	632.792.065.983,00	104,02
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	8.567.934.000,00	8.567.934.000,00	100,00
1.2.1.5	Dana Desa	47.688.372.000,00	47.688.372.000,00	100,00
1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.412.561.972,00	52.036.830.420,00	95,63
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	51.912.561.972,00	49.536.830.420,00	95,42

1.2.2.2	Bantuan Keuangan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	100,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	46.199.895.605,00	44.690.542.735,00	96,73
1.3.1	Pendapatan-Hibah	22.750.000.000,00	21.750.000.000,00	95,60
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	23.449.895.605,00	22.940.542.735,00	97,83

**Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
2016 – 2021 Di Kabupaten Solok Selatan**

Tahun	Target Anggaran(Rp)	Realisasi(Rp)	(%)
2016	884.296.041,00	422.128.411,00	47,73%
2017	2.500.000.000,00	723.019.561,00	28,92%
2018	2.000.000.000,00	682.106.680,00	34,1%
2019	2.500.000.000,00	527.842.143,00	21,08%
2020	150.000.000,00	116.533.127,00	77,33%
2021	2.500.000.000,00	882.445.406,00	35,29%

3.2. Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kabupaten Solok Selatan

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia sangat dibutuhkan pada pelayanan publik, karna menjadi hal pendukung yang sangat penting dalam mencapai pelayanan yang efektif dan efisien. BPKD solok selatan masih mengalami kekurangan dalam hal SDM yang mempengaruhi kualitas dari pelayanan publik terkhususnya terhadap Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di solok selatan.

b. Fasilitas Sarana dan Prasarana Yang Kurang Memadai

Sarana dan prasarana adalah salah satu faktor penentu dan penunjang dalam pelayanan publik, yang mana dengan adanya sarana dan prasarana yang baik akan membantu memberikan pelayanan yang efisien. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana dapat menjadi penghambat dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Saat ini sarana dan prasarana di kantor BPKD solok selatan masih kurang memadai sementara untuk mencapai pelayanan yang optimal perlu didukung dengan ketersediaan berbagai sarana dan prasarana. Adapun sarana dan prasarana yang peneliti lihat dari hasil observasi seperti perangkat computer, jaringan internet, hingga yang berkaitan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan.

2. Faktor Eksternal

a. Pandemi Covid – 19

Dari tahun 2019 pandemi covid terjadi, pada tahun 2020 sudah memasuki Indonesia yang mana pandemi ini mempengaruhi semua sektor di pemerintahan Indonesia termasuk pada pelayanan publik yang terhambat karna banyaknya protocol Kesehatan yang harus di terapkan. Covid-19 juga berdampak pada anggaran pada seluruh pemerintah daerah di solok selatan. Covid-19 membuat penerimaan PAD khususnya PBB-P2 di solok selatan

menurun karena dalam penerimaan dan pemungutan pajak tidak dapat berjalan secara maksimal.

b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang Pentingnya Pajak

Masyarakat di Solok Selatan Sebagian besar belum memahami bahwa betapa pentingnya membayar pajak yang membuat penerimaan pajak di Solok Selatan tidak mencapai target yang telah ditetapkan

3.3. Upaya Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam meningkatkan PAD melalui pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Solok Selatan

Sebagai upaya mendukung meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta untuk menganalisis tantangan dan hambatan yang di alami Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, maka BPKD melakukan beberapa upaya yaitu antara lain :

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas dari Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai penunjang keberhasilan dari pelaksanaan seluruh proses pelayanan publik hingga Penerimaan pajak untuk pendapatan daerah baik yang ada di kantor BPKD maupun yang ditugaskan dilapangan.
2. paningkatan fungsi aparat pemerintah sebagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, hingga sarana dan prasarana yang ada di kantor BPKD Solok Selatan.
3. penerapan, memperbaiki hingga membuat regulasi yang belum sesuai dengan aturan terbaru dan juga penambahan dari isi regulasi terkhususnya terkait dengan PBB-P2.
4. memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dengan membuat aplikasi berupa aplikasi e-kolektor untuk mempercepat penerimaan PBB-P2 dari masyarakat, selanjutnya aplikasi Si Bijak Daerah yaitu aplikasi yang menyediakan data base

wajib pajak yang melakukan penunggakan, menginformasikan tentang kewajiban pajak dari segala sisi menggunakan media Komunikasi seperti radio.

5. melibatkan perangkat nagari dalam pemungutan PBB-P2 di masyarakat secara langsung.
6. melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan berbagai cara, seperti sosialisasi langsung kepada masyarakat tentang pentingnya membayar PBB-P2, pendekatan hati ke hati kepada masyarakat, hingga membuat spanduk untuk mengajak masyarakat agar membayar PBB-P2.
7. meningkatkan kerja sama dengan perangkat daerah bidang pelayanan publik yang mana seluruh masyarakat diwajibkan untuk melampirkan bukti pembayaran PBB sebagai syarat pemenuhan pelayanan

3.4. Perumusan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Solok Selatan dengan Matriks SWOT

	STRENGTH (S)	WEAKNESS (W)
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya regulasi tentang PBB-P2 2. adanya aplikasi e-kolektor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. fasilitas sarana dan prasarana yang kurang memadai 2. jumlah SDM yang terbatas baik kualitas maupun kuantitas 3. data PBB belum valid 4. kurangnya sarana menyebarkan regulasi
OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kerja sama dengan perangkat daerah yang berkaitan dengan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan regulasi dalam peningkatan penerimaan PBB-P2. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarana prasarana sistem teknologi informasi pada pelayanan PBB-P2.

<p>elayanan public</p> <p>2. kemajuan sistem teknologi informasi</p>	<p>2. Memberdayakan SDM pada tingkat nagari dalam menggunakan sistem teknologi informasi berupa aplikasi e-kolektor sehingga penerimaan PBB-P2 dapat di tingkatkan.</p> <p>3. Meningkatkan kerjasama dengan perangkat daerah bidang pelayanan publik yang mensyaratkan bukti pembayaran PBB-P2 sebagai syarat pemenuhan pelayanan</p>	<p>2. Validasi data agar dapat memperkirakan penerimaan pendapatan daerah khususnya PBB-P2.</p> <p>3. Peningkatan kompetensi SDM mengenai penerimaan pendapatan daerah melalui PBB-P2</p> <p>4. Pemanfaatan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak dan pemerintah</p>
<p>TREATH (T)</p> <p>1. Adanya pandemi covid-19.</p> <p>2. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak.</p> <p>3. Sumber daya pengelola PBB tingkat nagari belum optimal.</p>	<p>STRATEGI S-T</p> <p>1. Melakukan sosialisasi regulasi tentang PBB-P2 kepada masyarakat sehingga menyadari pentingnya membayar pajak.</p> <p>2. Mengedukasi pengelola pajak tingkat nagari dalam proses penerimaan PBB-P2.</p> <p>3. Memberikan reward dan punishment kepada pengelola PBB-P2 tingkat nagari dalam pencapaian penerimaan.</p> <p>4. Menyesuaikan nilai NJOP dalam peraturan daerah</p>	<p>STRATEGI W-T</p> <p>1. Sosialisasi tentang pembayaran PBB-P2 melalui media lainnya banner, spanduk, dan radio.</p> <p>2. Membuat software berupa aplikasi si bijak daerah tentang pelaporan dan pembayaran PBB-P2 yang menyediakan data base wajib pajak yang menunggak.</p> <p>3. Pembayaran dilakukan secara non-tunai melalui ATM maupun banking pada pembayaran PBB-P2</p>

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pendapatan Asli Daerah merupakan kunci utama dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. realisasi penerimaan PBB di solok selatan pada tahun 2021 masih jauh dari target. BPKD juga melakukan upaya - upaya agar tahun 2022 bisa sesuai dengan target yang ada. kenyataannya realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten solok selatan sudah memberikan kontribusi yang cukup tetapi belum membantu dalam mencapai target yang ditetapkan. Setiap tahun dilakukan analisis untuk membuat target penerimaan PBB-P2 di tahun selanjutnya dengan berdasarkan kepada tahun sebelumnya, namun beberapa tahun terakhir realisasi penerimaan PBB-P2 di Solok Selatan sedikit menurun dikarenakan faktor internal maupun eksternal yang ada, diantaranya Terbatasnya jumlah sumber daya manusia di BPKD solok selatan khususnya terkait dengan yang menangani pajak daerah, Fasilitas sarana dan prasarana yang ada kurang memadai dalam mendukung proses pelayanan public, Adanya pandemi covid-19, kurangnya kesadaran dari masyarakat akan pentingnya membayar pajak, Data PBB-P2 yang belum valid.

Layaknya realisasi PBB lainnya, dan berdasarkan kondisi yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi. Penetapan NJOP yang tidak sesuai dengan harga pasar, pengelolaan PBB yang belum terkomputerisasi, kurang akuratnya data tentang PBB serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB merupakan permasalahan utama yang menghambat upaya peningkatan penerimaan PBB, layaknya temuan PRATIWI, Dhian Rahayu (Pratiwi & Rahayu , 2006). Selanjutnya Di Kabupaten Klaten , realisasi penerimaan PBB dalam beberapa tahun terakhir kurang memuaskan , ini ditandai dengan rendahnya realisasi penerimaan tiap tahun jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Dengan pola hasil dimana sebagian besar penerimaan PBB diberikan kepada pemerintah daerah tingkat II, sudah seharusnya penanganan PBB yang menjadi kewenangan daerah dalam pemungutannya harus lebih optimal untuk memperkuat kapasitas fiskal Kabupaten Klaten,layaknya temuan WIBOWO dan Harjanto Hery (Wibowo & Hery, 2009).

Selanjutnya Kondisi yang terjadi di adalah belum optimalnya sistem administrasi yang disebabkan proses pembayaran PBB dan BPHTB baru dilaksanakan oleh pihak Dispenda Kota Palembang yang sebelumnya di lakukan oleh Kantor Pajak Pratama. Proses

pembayaran PBB terkesan bertele-tele sehingga memakan waktu yang lama. Tempat/ loket untuk pembayaran PBB yang sangat terbatas. Proses verifikasi BPHTB yang lebih lama dibandingkan sebelumnya. Layaknya temuan Maiza Fikri, 2017. Realisasi penerimaan PBB di Kota Batu masih banyak masyarakat yang kurang memperhatikan dalam membayar pajak, masyarakat selalu menunggu saat jatuh tempo dalam membayar pajak, terkadang juga para pemungut pajak merasa kesulitan dalam mencari alamat wajib pajak untuk memberikan SPP, layaknya temuan Rambu Trio dkk, 2020.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah cukup mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir khususnya pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Solok Selatan. Penurunan PAD di Kabupaten Solok Selatan terjadi dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat mulai dari faktor internal hingga faktor eksternal yang ada, terutama yang membuat penurunan yang sangat drastis disebabkan karna faktor eksternal yaitu adanya pandemi covid-19. Namun dalam menyikapi hal tersebut Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan telah mempersiapkan strategi untuk mengatasi hal tersebut. BPKD Solok Selatan tidak hanya menyikapi terhadap penghambat yang ada namun juga membuat strategi dan melakukan upaya agar PAD di Kabupaten Solok Selatan dapat meningkat dengan mengikuti era yang ada, seperti dengan pemanfaatan teknologi yang ada. BPKD Solok Selatan dalam meningkatkan PAD melalui PBB-P2 juga melibatkan diluar pegawai yang ada di kantor BPKD khususnya pemungut pajak yaitu seperti perangkat desa yang ada pada setiap desanya sehingga penerimaan PBB-P2 dapat diterima secara maksimal oleh daerah.

Keterbatasan Penelitian : peneliti ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Solok Selatan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Mahmudi dan Ani Sri Rahayu

Arah Masa Depan Penelitian : Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan analisis kemampuan keuangan daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang banyak membantu dan membimbing serta memberi dukungan, motivasi dan doa kepada penulis selama ini. Maka dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada keluarga tercinta dan segenap pegawai Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Solok Selatan yang banyak membantu dan mansukseskan selama proses magang dan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Budi, Purnomo S. 2009. *Obligasi Daerah*. Alfabeta: Bandung
- Bungin, Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika
- Esterberg, Kristin G, 2002. *Qualitative Methods Ins Social Research*. Mc Graw Hill, New York
- Halim, Abdul. 2014. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Husein, Umar. 2003. *Metode Riset Perilaku Konsumen Jasa*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Kotler, Philip & Keller. 2008. *Manajemen Pemasaran*. Edisi Ketigabelas. Jilid 1. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi
- Morissan. 2017. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Neuman, W.L. 2006. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. 6th Edition. New York: Allyn and Bacon
- Neuman, W.Laurence. 2016. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: PT. Indeks
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- Pramono, Hariadi. Yanuar E. Restiyanto dan I.R Bawono. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- Rangkuti, Freddy. 2005. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
- Saragih, B. 2010. *Agribisnis, Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi*.

- Siagian, Sondang. 2002. *Menejemen strategik*. Jakarta: PT. Bumi Askara
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintah*. Bandung: Alfabeta
- Suryono, Agus. 2010. *Dimensi-dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang: UB Press
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2013. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV
- Warsito. 2001. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada

